

**KAJIAN TEORITIS TENTANG TINDAKAN MAIN HAKIM SECARA
BERSAMA-SAMA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

[illegible]

Ahmad Hanafi membagi kerja sama dalam berbuat jarimah dalam empat kemungkinan.³⁵

- ³⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 55
³⁵ Ibid, 55

- Dasar perbedaan antara keduanya: yang pertama melakukan secara langsung unsur material tindak pidana, karena itu ia dinamakan *sharīk fil mubāsyarah* (pelaku langsung), sedangkan yang kedua menjai sebab terjadinya tindak pidana, baik karena janji, manghasut, atau memberikan bantuan, tetapi tidak turut serta secara langsung melakukan unsur material tindak pidana karena itu dinamakan *sharīk bit tasabbub* (pelaku tidak langsung).³⁸

- ³⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 136-137

[illegible]

permulaan pelaksanaan tindak pidana pembunuhan. Contoh ini menggambarkan bahwa A dianggap sebagai orang yang turut serta secara langsung.³⁹

Turut serta secara langsung adakalanya dilakukan secara kebetulan dan adakalanya dilakukan secara terencana. Kerja sama yang dilakukan secara kebetulan disebut *tawāfuq*. *Tawāfuq* adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Mereka secara tiba-tiba melakukan jarimah secara sendiri-sendiri. Jadi, kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba. Misalnya, A sedang berkelahi dengan B. C yang mempunyai dendam kepada B kebetulan lewat dan ia menusukkan pisau ke perut B sehingga meninggal. Dalam hal ini, A dan C bersama-sama membunuh B, tetapi antara mereka tidak ada kesepakatan sebelumnya.⁴⁰ Dalam kasus ini, pertanggungjawaban mereka bergantung kepada perbuatan masing-masing sesuai dengan kaidah:

“Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan *tawāfuq* dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing.”⁴¹

Tama'alu' adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama

⁴¹ Abdul al-Qadir 'Awdah, *al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi Muqararanan bi al-Qanūn al-Wadh'i* Jilid II, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992), 360

dan terencana. Mereka bekerja sama melakukan jarimah secara langsung sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, A dan B bersepakat untuk membunuh C. A kemudian mengikat C dan memukulnya sampai meninggal. Dalam hal ini, A dan B dianggap sebagai pelaku atau orang yang turut serta secara langsung atas dasar kesepakatan. Mereka memiliki tugas masing-masing. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan jarimah secara keseluruhan, yaitu pembunuhan⁴², jika mereka terlibat langsung dalam pembunuhan tersebut sesuai dengan kaidah:

يُسَا لْ كُلُّ شَرِيكَ عَنْ كُلِّ فِعْلٍ شَرِيكَ فِي حَالَةِ التَّمَالُؤِ

“Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan *tamālū* dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat jarimah.”⁴³

Kaidah ini dipegang oleh jumhur termasuk di dalamnya Ibnu Taimiyah. Ia menyatakan:

إِذَا اشْتَرَى كُوفِي قَتَلَ مَعْصُومٌ بِحَيْثُ اُنْحُمَ جَمِيعُهُمْ بِأَشْرَؤِ قَتْلِهِ وَحِبِّ الْقَوْدِ عَلَيْهِمْ جَمِيعُهُمْ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ قَدْ بَاشَرَ وَبَعْضُهُمْ قَائِمٌ يَحْرُسُ

“Apabila orang-orang berserikat melakukan pembunuhan secara langsung, maka hukumannya adalah kisas terhadap mereka yang terlibat, meskipun sebagian mereka melakukan pembunuhan, sedangkan sebagian lagi hanya menjaga saja.”⁴⁴

⁴² Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Pustaka, 2004), h. 25

⁴³ Abdul al-Qadir ‘Awdah, *al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islâmi Muqāranan bi al-Qanūn al-Wadh’i* Jilid II, 360

⁴⁴ Ahmad bin ‘Abd al-Halim bin Taymiyah al-Hurani Abu al-Abbas, *Majmu’ al-Fatawa*, Juz XXXIV, (t.t: Dar al-Fikr, t.th.), 158

فِرْقٌ بَيْنَ التَّوَّافِقِ وَ التَّمَالُؤِ

Pertanggungjawaban pelaku secara langsung dalam *tawāfuq* dan *tamālū'*, fukaha berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama, pertanggungjawaban pelaku antara *tawāfuq* dan *tamālū'* terdapat perbedaan. Di dalam *tawāfuq*, masing-masing pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Di dalam *tamālū'*, para pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka secara keseluruhan. Jika korbannya meninggal, masing-masing pelaku dianggap sebagai pembunuh.

Menurut Abu Hanifah dan sebagian Syafi'iyah, antara pertanggungjawaban para pelaku dalam *tawāfiq* dan *tamālu'* tidak ada perbedaan. Artinya, masing-masing pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak bertanggung jawab atas akibat perbuatan secara keseluruhan.⁴⁶

⁴⁶ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, 79

2. Turut Serta Melakukan Jarimah Secara Tidak Langsung

Turut serta melakukan jarimah secara tidak langsung (*al-ishtirāk bi al-tasabbub*) adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan. Hal ini menunjukkan bahwa unsur-unsur turut serta berbuat tidak langsung ada tiga macam.

Pertama, adanya perbuatan yang dapat dihukum.

Kedua, adanya niat dari orang yang turut berbuat agar dengan sikapnya itu perbuatan tersebut dapat terjadi.

Ketiga, cara mewujudkan perbuatan tersebut adalah mengadakan kesepakatan, menyuruh atau memberi bantuan.⁴⁷

a. Adanya Perbuatan Yang Dapat Dihukum

Untuk terwujudnya turut serta tidak langsung, disyaratkan adanya perbuatan yang dapat dihukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut tidak perlu harus selesai melainkan cukup walaupun baru percobaan saja. Juga tidak disyaratkan pelaku langsung harus dihukum langsung.

b. Adanya Niat Dari Orang Yang Turut Berbuat

⁴⁷ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, 79

Untuk terwujudnya turut serta tidak langsung, juga disyaratkan adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan persepakatan, suruhan atau bantuannya itu perbuatannya itu dapat terjadi. Kalau tidak ada jarimah tertentu yang dimaksudkan maka orang tersebut dianggap turut berbuat dalam semua jarimah yang terjadi, apabila dimungkinkan oleh niatnya. Kalau jarimahnya ditentukan, tetapi yang terjadi jarimah lain yang tidak dimaksudkannya maka tidak terdapat turut berbuat, meskipun karena persepakatan, suruhan atau bantuan tersebut ia bisa dijatuhi hukuman.

c. Cara Mewujudkan Perbuatan

Turut berbuat tidak langsung terjadi dengan cara sebagai berikut:⁴⁸

1) Persepakatan

Persepakatan bisa terjadi karena adanya saling pengertian dan kesamaan kehendak untuk melakukan suatu jarimah. Kalau tidak ada persepakatan sebelumnya maka tidak terdapat turut berbuat. Meskipun ada persepakatan tetapi jarimah yang terjadi bukan yang disepakati maka juga tidak ada turut berbuat. Dengan demikian, untuk terjadinya turut berbuat dengan cara persepakatan, jarimah yang terjadi harus merupakan akibat dari persepakatan itu. Dalam hal ini, Imam Malik mempunyai pendapat sendiri,

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 71

2) Suruhan atau hasutan

3) Memberi Bantuan

Orang yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam melaksanakan suatu jarimah dianggap sebagai kawan berbuat tidak

[illegible]

langsung, meskipun tidak ada kesepakatan sebelumnya. Seperti mengamati jalan untuk memudahkan pencurian bagi orang lain. Para fukaha membedakan antara pelaku langsung (*mubāshir*) dengan pemberi bantuan (*al-mu'in*). Pelaku langsung (*mubāshir*) adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sedangkan, pemberi bantuan (*al-mu'in*) adalah orang yang tidak berbuat atau mencoba berbuat, melainkan hanya menolong pembuat langsung dengan perbuatan-perbuatan yang pada lahirnya tidak ada sangkut-pautnya dengan perbuatan yang dilarang tersebut dan juga tidak dianggap sebagai permulaan pelaksanaan dari perbuatan yang dilarang tersebut.

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam, yaitu:⁵⁰

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, 27-28

- Kedua, unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jarimah yang lainnya. Misalnya, pada jarimah pencurian harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda. Perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, barang itu milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri. Syarat yang berkaitan dengan benda, bahwa benda itu berupa harta, ada pada tempat penyimpanan, dan mencapai satu nisab. Unsur khusus yang ada pada jarimah pencurian tidak sama dengan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara unsur yang umum dan khusus pada jarimah ada perbedaan. Unsur umum jarimah macamnya hanya satu dan sama pada setiap jarimah, sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jarimah.

atau Pengeroyokan (jinayah terhadap harta)

enganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa)
kesalahan. Dalam hal ini, para ulama men
(1) *ibānat al-aṭraf*, yaitu memotong anggot
motongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi
al-aṭraf, yaitu menghilangkan fungsi anggota

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa pelukaan dengan tangan kosong atau cambuk itu diancam dengan sanksi takzir, sekalipun menurut ibn al-Qayyim dan sebagian Hanabilah pelaku pelukaan terakhir diancam dengan sanksi kisas.⁵³

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَاللِّسْنَ بِاللِّسَنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۖ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٨٤﴾

⁵² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 38

⁵³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 179

⁵⁴ Nazri Adlany, et.al, *Al Quran Terjemah Indonesia*, 207

b) Ditinjau dari Segi Objek/Sasarannya

1. Penganiayaan Atas Anggota Badan dan Semacamnya

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 181

3. *Shajjaj*

Yang dimaksud *shajjaj* adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Sedangkan, pelukaan atas badan selain muka dan kepala termasuk kelompok keempat, yaitu *jirāh*.

⁶⁰ Ibid, 181

organ-organ tubuh yang termasuk kelompok anggota badan, meskipun ada pada bagian muka, seperti mata, telinga, dan lain-lain tidak termasuk *shajja*.⁶¹

C. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam

Secara terminologis, pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan atas dasar kemauan sendiri. Hal ini karena

[illegible]

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal. *Pertama*, adanya perbuatan yang dilarang. *Kedua*, adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. *Ketiga*, kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu. Dengan adanya syarat seperti itu, dapat dimengerti bahwa yang dapat dibebani hukuman adalah manusia sebagai subjek hukum dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana harus dilakukan. Dengan demikian, orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban pidana. Karena badan hukum tidak bisa berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, pertanggungjawaban dikenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut. Dengan demikian, apabila terjadi perbuatan yang dilarang kemudian dilakukan oleh orang yang bertindak atas nama badan hukum, maka orang tersebut yang dibebani pertanggungjawaban pidana.⁶⁵

ahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 151
id, 152

⁶⁵ Ibid, 152

Kalau seseorang melakukan tindak pidana dalam keadaan sakit saraf (gila), maka dia tak akan dihukum. Imam Abu Yusuf berkata bahwa: “Hukuman had dapat dikenakan kepada tertuduh setelah dia mengakuinya, jika tidak perjelaslah bahwa dia tidak gila, atau mengalami gangguan mental. Bila ternyata dia bebas dari kekurangan semacam itu, maka dia harus menjalankan hukuman yang berlaku.” Oleh karena itu, hakim sangat perlu meyakinkan dirinya sendiri dengan pikiran yang jernih atas perkara kriminal itu sebelum dia menyatakan keputusannya.

⁶⁶ Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992), 16

Pembebasan pertanggungjawaban terhadap ketiga orang tersebut berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧﴾

“Barangsiapa ingkar kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali orang-orang yang dipaksa sedang hatinya tenteram (tetap) dengan iman, tetapi barangsiapa dengan hatinya terbuka dengan kekafiran, maka atas mereka kemurkaan dari Allah. Dan bagi mereka azab yang besar.” (QS. An-Nahl: 106)⁶⁹

2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana

Orang yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan adalah orang yang melakukan kejahatan, bukan orang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah: (QS. Al-Fatir: 18)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَآ لَا حِمْلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil orang untuk memikul dosa itu tidaklah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.”⁷⁰

أَلَا تَرَوْا وَازِرَةً وُزِّرَ أُخْرَى ﴿٢٨﴾ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٢٩﴾

⁶⁹ Nazri Adlany, et.al, *Al Quran Terjemah Indonesia*, 522

⁷⁰ Ibid, 859

Apabila jarimah yang mereka lakukan adalah jarimah pembunuhan, maka hukuman terhadap mereka diperselisihkan. Mayoritas fukaha seperti Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, al-Thawri, Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr berpendapat apabila beberapa orang membunuh satu orang, mereka harus dibunuh semuanya. Pendapat ini adalah pandangan 'Umar bin Khattab. Dalam satu riwayat beliau pernah berkata:

قُتِلَ غُلَامٌ غَيْلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكْتُ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ

Ulasan:

“Menurut hakim Shan’a bernama Mughirah, bahwa ada seorang ibu di Shan’a yang suaminya menghilang saja dan ditinggalkannya di kamar rumahnya seorang anaknya laki-laki bernama Ashil dari istrinya yang lain, lalu ibu itu mengangkat jadi temannya seorang laki-laki lain, seraya berkata kepada laki-laki itu, “Sesungguhnya anak laki-laki akan membukakan rahasia kita

⁷⁶ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keturunan Amal*, (Bandung: Khazanah PT Mizan Pustaka, 2010), 483

ahli fikih kota-kota besar berpendapat seperti Umar, karena sulit membuktikannya secara pasti, Syafi'i, jamaah dan satu riwayat dari Malik

1. Jumhur ahli fikih kota-kota besar berpendapat seperti yang dilakukan Khalifah Umar, karena sulit membuktikannya secara pasti.
2. Nashir, Syafi'i, jamaah dan satu riwayat dari Malik berpendapat bahwa para waris yang terbunuh memilih satu orang dari kelompok pembunuhnya itu.
3. Menurut kata lain dari Malik ialah agar dilakukan undian, maka siapa yang jatuh undian di atasnya, maka dialah yang mengalami kisas itu, dan yang lain membayar denda menurut ukurannya dengan dalil kesekufuan.

⁷⁸ Ibid, 167

2. Turut Serta Secara Tidak Langsung

Menurut hukum pidana Islam, pada dasarnya hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam jarimah hudud dan kisas hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan pelaku tidak langsung. Dengan demikian, orang yang turut berbuat tidak langsung dalam jarimah dijatuhi hukuman takzir.

Mengenai hukuman peserta tidak langsung, menurut hukum Islam adalah hukuman takzir, sebab jarimah turut berbuat tidak langsung tidak ditentukan oleh syarak, seperti telah kita ketahui hanya jarimah hudud dan kisas/diat saja.

⁸² Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, 80

Spesifikasi terhadap jarimah hudud dan kisas karena pada umumnya hukuman yang telah ditentukan sangat berat dan pelaku yang berbuat tidak langsung adalah syubhat yang menggugurkan hukuman had. Selain itu, pelaku tidak langsung tidak sama bahayanya dibandingkan dengan pelaku langsung. Jika perbuatan pelaku tidak langsung bisa dipandang sebagai pelaku langsung karena pelaku langsung hanya sebagai alat yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung, maka pelaku tidak langsung tersebut bisa dijatuhi hukuman had dan kisas. Menurut Malik, pelaku tidak langsung dapat dipandang sebagai pelaku langsung apabila orang tersebut menyaksikan terjadinya jarimah.⁸⁴

Amat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, 58
 Aid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, 80

⁸⁴ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, 80

- ⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 665

- d. *Al-Mutalahimmah* adalah luka masuk ke daging.
- e. *al-Simhāq* adalah luka yang menyisakan antara luka dalam dengan tulang yang hanya selaput tipis.
- f. *Al-Muwadhdhihah* adalah luka yang sampai ke tulang sehingga tampak tulangnya.
- g. *Al-Hāshimah* adalah luka luka yang sampai mematahkan tulang dan meremukannya.
- h. *Al-Munqilah* adalah luka yang sampai ke tulang dan mematahkannya sehingga tergeser dari tempatnya.
- i. *Al-Ma'mūmah* adalah luka yang sampai pada selaput batok kepala.
- j. *Al-Jāifah* adalah luka yang dalam.

Diwajibkan atas luka yang di bawah luka *muwadhhdhiḥah* apa yang diputuskan oleh sang hakim yang adil, ada juga yang mengatakan bahwa dalam kasus ini hanya diwajibkan membayar ongkos perawatan dokter. Adapun luka *Al-Muwadhhdhiḥah* diwajibkan atasnya hukum kisas bilamana dilakukan secara sengaja. Dan wajib membayar seperdua puluh diat bilamana dilakukan secara tidak sengaja/kesalahan, baik luka tersebut besar ataupun kecil. Diat dari luka ini adalah sebanyak lima ekor unta, ini sebagaimana

Dalam luka *Al-Hashimah* denda sepersepuluh diat banyaknya sepuluh ekor unta., keputusan ini berdasarkan riwayat dari sahabat Zaid Ibnu Tsabit, dan ternyata tak seorangpun di antara para sahabat yang tidak sependapat dengannya.

Untuk luka *Al-Munqilah* sepersepuluh diat dan setengahnya yaitu sebanyak lima belas ekor unta.

Untuk luka *Al-Ma'mūmah*, denda sebanyak sepertiga diat berdasarkan konsensus para ulama ahli fikih.

Dan untuk luka *Al-Ja'ifah*, dendanya sebanyak sepertiga diat berdasarkan konsensus para ulama, dan bilamana lukanya sampai menembus

[illegible]

hukum pidana Islam diklasifikasikan dengan rumusan : “Dirampas atas selain jiwa (penganiayaan) yang disengaja bilamana tindakan dilakukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk mengakibatkan kematian dan tubuh korban.”

hukum pidana Islam diklasifikasikan dengan rumusan : “Dirampas atas selain jiwa (penganiayaan) yang disengaja bilamana tindakan dilakukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk mengakibatkan kematian dan tubuh korban.”

hukum pidana Islam diklasifikasikan dengan rumusan : “Dirampas atas selain jiwa (penganiayaan) yang disengaja bilamana tindakan dilakukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk mengakibatkan kematian dan tubuh korban.”

